

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- _____. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- _____. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Budiarjo, Miriam dan Ibrahim Ambong, ed. *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Djojosoekarto, Agung, et al. *Menjadi Wakil Rakyat dalam Tata Demokrasi Baru*. Jakarta: Sekretariat Nasional ADEKSI-Konrad Adenauer Stiftung, 2004.
- _____. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Jakarta: Sekretariat Nasional ADEKSI-Konrad Adenauer Stiftung, 2004.
- _____. *Membangun Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD*. Jakarta: Sekretariat Nasional ADEKSI-Konrad Adenauer Stiftung, 2004.
- _____. *Dinamika dan Kapasitas DPRD dalam Tata Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2004.

- Dwiyanto, Agus. ed. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Fatwa, A.M. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 9th Ed. St. Paul: West Publishing Co., 2004.
- Grolier. *New Webster's Dictionary*. Vol. I. (Danbury, Connecticut: Grolier Incorporated, 1992.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Haris, Syamsuddin. ed. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.
- Marbun, B.N. *DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Piliang, Indra J. dan T.A. Legowo. ed. *Disain Baru Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: CSIS, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. *Manual Pedoman Perancangan Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2007.
- _____. *Modul Perancangan Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2008.
- Sударsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sulastomo dan Tommi A. Legowo. peny. *Memadukan Langkah Membangun Indonesia Masa Depan*. Jakarta: Gerakan Jalan Lurus, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. *Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. UU Nomor 28 Tahun 1999, LN Nomor 75 Tahun 1999, TLN Nomor 3851.

_____. *Undang-Undang tentang Keuangan Negara*, UU Nomor 17 Tahun 2003, LN Nomor 47 Tahun 2003, TLN Nomor 4286.

_____. *Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU Nomor 22 Tahun 2003, LN Nomor 92 Tahun 2003, TLN Nomor 4310.

_____. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU Nomor 10 Tahun 2004, LN Nomor 53 Tahun 2004, TLN Nomor 4389.

_____. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 32 Tahun 2004, LN Nomor 125 Tahun 2004, TLN Nomor 4437.

_____. *Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 33 Tahun 2004, LN Nomor 126 Tahun 2004, TLN Nomor 4438.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, PP Nomor 24 Tahun 2004, LN Nomor 90 Tahun 2004, TLN Nomor 4416.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, PP Nomor 37 Tahun 2005, LN Nomor 94 Tahun 2005, TLN Nomor 4540.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, PP Nomor 58 Tahun 2005, LN Nomor 140 Tahun 2005, TLN Nomor 4578.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, PP Nomor 37 Tahun 2006, LN Nomor 90 Tahun 2006, TLN Nomor 4659.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, PP Nomor 21 Tahun 2007, LN Nomor 44 Tahun 2007, TLN Nomor 4709.

_____. *Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009*, Perpres Nomor 7 Tahun 2005, LN Nomor 11 Tahun 2005.

_____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional*, Permendagri Nomor 21 Tahun 2007.

C. Jurnal

Ida, Laode. "Pemilihan Langsung Kepala Daerah". *Jurnal Pusat Studi Pengembangan Kawasan Edisi 5*.(2003): 9-19.

Loy, Nikolaus. "Peran Jaringan Kebijakan dalam Mendorong Tata Pemerintahan yang Baik: Belajar dari Uni Eropa". *Warta Gubernur Jurnal Otonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 2*, (2007): 36-47.

D. Makalah

Effendy, Marwan. "Kedudukann Keuangan DPRD dari Aspek Pidana dan Upaya Mewujudkan Good Governance". Makalah pada Rapat Kerja Nasional Anggota Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Tahun 2006 dengan tema "Optimalisasi Peran DPRD Dalam Membangun Kemitraan Strategis Untuk Mewujudkan Desentralisasi dan Tata Pemerintahan Demokratis, Pekanbaru, 24 Agustus 2006.

E. Situs Internet

Agung Yuriandi, “Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound dan Karl Von Savigny Dipandang Dari Perspektif Politik Hukum”, <http://www.scribd.com/doc/8322731/Perbandingan-Teori-Roscoe-Pound-Friedrich-Karl-von-Savigny-Dipandang-Dari-Perspektif-Politik-Hukum>. (17 Desember 2009).

Media Center KPU, “Jumlah Caleg, Kursi dan Dapil pada Pemilu 2009”, http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/DATA_OLAHAN/indonesia_dalam_angka.pdf. (11 Januari 2010).

Wahyudi Djafar, “Asas Legalitas dalam Doktrin Hukum Indonesia”, <http://www.legalitas.org/?q=content/asas-legalitas-doktrin-hukum-indonesia>. (22 Februari 2010).

Wawan F dan Bobby Lukman, “Analisa Kedudukan PP 21/2007 dari Perspektif Yuridis”, <http://www.adkasi.org/id.php/main/berita/92>. (3 Februari 2010).